



# 2022

Laporan Kinerja Interim TW I  
Pusat Pengembangan Pengujian  
Obat dan Makanan Nasional



# TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

## **Penanggung Jawab**

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

## **Ketua**

Rina Azhariyati, S.Si, Apt

## **Sekretaris**

Adinda ST

## **Anggota**

1. Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D
2. Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
3. Endah Kristiana, S.Si, M.Si
4. Nur Aini, S.Si, M.Sc
5. Wiratmoko Dani Kusuma, S.Si.
6. Ratih Pujilestari, S.Si, M.Biomed.
7. Prima Purnama, S.Farm
8. Mia Riska, S.Si
9. Harianto, S.A.P
10. Fitrah Dien Karima
11. Randy Hidayatullah

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja PPPOMN disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PPPOMN wajib mengimplemetasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 PPPOMN disusun dengan mengacu pada RENSTRA PPPOMN Tahun 2020-2024 dan telah dilakukan reviu pada tahun 2021 yang terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator utama yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Eselon II Tahun 2022. Laporan ini menyajikan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi selama satu triwulan, sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas perencanaan dan pencapaian kinerja PPPOMN.

Kami berharap penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 PPPOMN ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pada triwulan selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Jakarta, 18 April 2022

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kashuri'.

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022, yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024 yang mempunyai 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator utama tersebut, telah dilakukan perhitungan capaian terhadap 9 (sembilan) indikator, sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya (Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Indeks pelayanan publik PPPOMN, Indeks RB PPPOMN, Nilai AKIP PPPOMN, Indeks profesionalitas ASN PPPOMN, dan Status akreditasi) akan diukur pada akhir tahun. Dari hasil pengukuran capaian indikator didapatkan nilai sebagai berikut.

### 1. Kriteria baik $90\% \leq x < 110\%$ yaitu

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian (96,38%)
- ✓ Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM (100%)
- ✓ Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan (99,06%)
- ✓ Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan (100,56%)
- ✓ Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar (97,40%)
- ✓ Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu (107,53%)
- ✓ Jejaring pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif (100%)

### 2. Kriteria cukup $70\% \leq x < 90\%$

- ✓ Nilai kinerja anggaran PPPOMN (86,88 %)

### 3. Kriteria tidak dapat disimpulkan $>120\%$

- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal (122,2%)

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari rupiah murni sebesar Rp80.456.344.000,- (delapan puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp5.501.327.000,- (lima miliar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dikelola untuk program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp47.831.187.000,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 (tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA .....	1
KATA PENGANTAR .....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	7
DAFTAR LAMPIRAN .....	8
BAB I - PENDAHULUAN.....	9
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	9
1.2 Struktur Organisasi.....	9
1.5 Isu Strategis Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul.....	15
BAB II – PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan .....	19
2.2 Sasaran Strategis.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	21
2.3 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022 .....	22
2.4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja.....	24
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022.....	26
3.2 Capaian Kinerja Anggaran TW 1 Tahun 2022 .....	59
BAB IV - PENUTUP .....	62
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	63
LAMPIRAN .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN .....	22
Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022.....	23
Tabel 3. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja .....	25
Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 .....	26
Tabel 5. Capaian SKL PPPOMN TW 1 Tahun 2022 .....	30
Tabel 6. Jumlah Responden SKM Berdasarkan Jenis Layanan .....	34
Tabel 7. Nilai SKM Tiap Jenis Layanan.....	34
Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan.....	34
Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik .....	35
Tabel 10. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Triwulan I Tahun 2022.....	38
Tabel 11. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN .....	11
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan .....	13
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	14
Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	14
Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur .....	14
Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI .....	20
Gambar 9. Peta Strategi Level 2 PPPOMN.....	21
Gambar 10. Kepuasan Pelayanan Secara Umum.....	35
Gambar 11. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	64
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	65
Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal .....	66



# BAB I

---

## PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM no 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

## 1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional PPPOMN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
- d. pelaksanaan uji profesiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;

- g. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

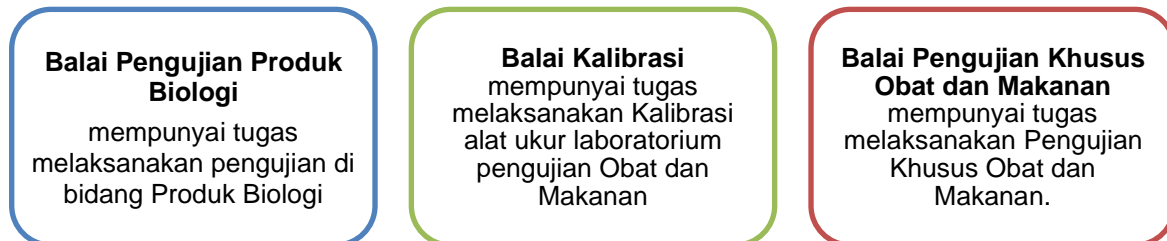
Penjabaran Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2. 12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu Pengelompokan uraian fungsi PPPOMN terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi obat dan bahan obat; dan
  - b) Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- 2) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
  - b) Subkelompok substansi kosmetik.
- 3) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi mutu dan gizi; dan
  - b) Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya.
- 4) Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan; dan
  - b) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
- 5) Kelompok substansi pengembangan baku pembanding, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi baku pembanding obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional; dan
  - b) Subkelompok substansi baku pembanding suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Secara umum, masing-masing Kelompok substansi dikoordinir oleh Koordinator jabatan fungsional. Koordinator tersebut melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

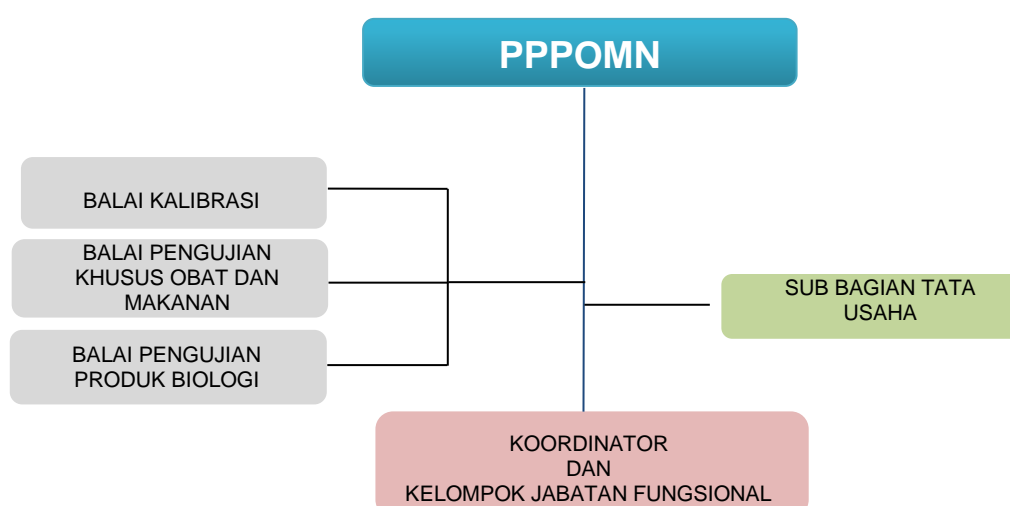
Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan PPPOMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:



Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (eselon 2), Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN juga membawahi 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN**  
Sumber: Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, PPPOMN melaksanakan salah satu dari program utama (teknis) BPOM yaitu: **Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan** yaitu:

**1. Pengembangan metode analisis kimia, biologi, mikrobiologi, dan biologi molekuler dan pengembangan baku pembanding.**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan MA baru dan atau memperbaharui MA yang dibutuhkan dalam pengujian obat dan makanan. Validitas MA sangat penting untuk menjamin validitas pengujian, sehingga metode analisis yang dikembangkan PPPOMN dapat berperan dalam pengambilan keputusan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh BPOM. Pengembangan baku pembanding merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan MA dan pengujian dengan beberapa MA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan baku pembanding baru dan melakukan uji ulang/stabilitas Baku Pembanding. Baku pembanding yang ditetapkan digunakan oleh Industri farmasi, Universitas dan seluruh laboratorium BPOM.

**2. Pengujian Obat dan Makanan**, dalam hal ini kegiatan pengujian di PPPOMN dilakukan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan untuk sampel kasus dan dalam rangka penindakan, sampel dalam rangka uji konfirmasi, surveilan mutu dan keamanan atau sampel kasus nasional. Pengujian juga dilakukan oleh Balai Pengujian Produk Biologi untuk sampel produk biologi, serta Bidang Kimia Obat Nappza untuk pengujian sampel dalam rangka PQ-WHO.

**3. Pengelolaan alat laboratorium BPOM**

mencakup kalibrasi dan pemeliharaan alat, kajian kebutuhan dan pemanfaatan alat .

**4. Peningkatan kemampuan laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP melalui penilaian kemampuan setiap laboratorium BB/Balai POM dengan menggunakan tools.**

**5. Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan.**

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta laboratorium eksternal dalam pengembangan/standardisasi MA dan pengembangan BP. Selain itu, dalam mendukung pemenuhan standar/persyaratan ASEAN dan Internasional, laboratorium PPPOMN terus meningkatkan kapabilitas pengujian melalui keikutsertaan dalam pertemuan dan uji profisiensi/kolaborasi. Kedepannya kegiatan yang melibatkan laboratorium eksternal, industri obat dan makanan akan ditingkatkan sebagai upaya meminimalisir dispute/kesenjangan hasil pengujian dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian di Indonesia. Penguatan laboratorium BPOM akan dilakukan

melalui peningkatan lingkup pengujian produk biologi, perbaikan manajemen laboratorium seperti regionalisasi dan spesialisasi laboratorium.

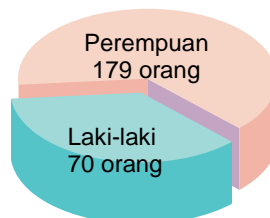
- 6. Penataan proses bisnis dan peningkatan jenis layanan Publik berbasis elektronik.** Kegiatan ini untuk memudahkan layanan internal PPPOMN, BPOM dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik PPPOMN. Peningkatan pemenuhan standar mutu ISO, merupakan perwujudan komitmen PPPOMN untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder/masyarakat pengguna layanan PPPOMN khususnya terkait layanan penyediaan baku pembanding kimia dan uji profisiensi. Hal-hal yang belum terakomodir dalam kedua standar ISO yang telah diterapkan (ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017), tata kelolanya akan lebih diperhatikan dengan penerapan standar ISO/IEC 17034 dan ISO/IEC 17043.

#### 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

##### Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPOMN sampai akhir Desember 2021 didukung oleh 184 orang PNS dan dibantu pramubakti sebanyak 65 orang. Jumlah ini sudah termasuk penambahan CPNS sebanyak 17 orang pada bulan Maret 2022. Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

- a. Berdasarkan jenis kelamin:



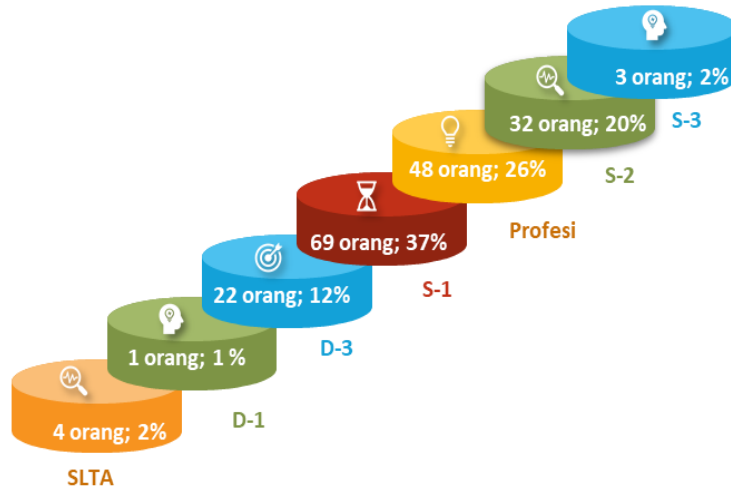
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

- b. Berdasarkan golongan:



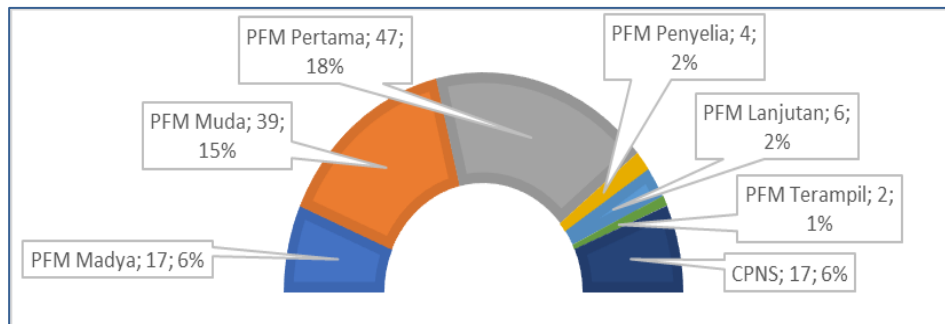
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan tingkat pendidikan



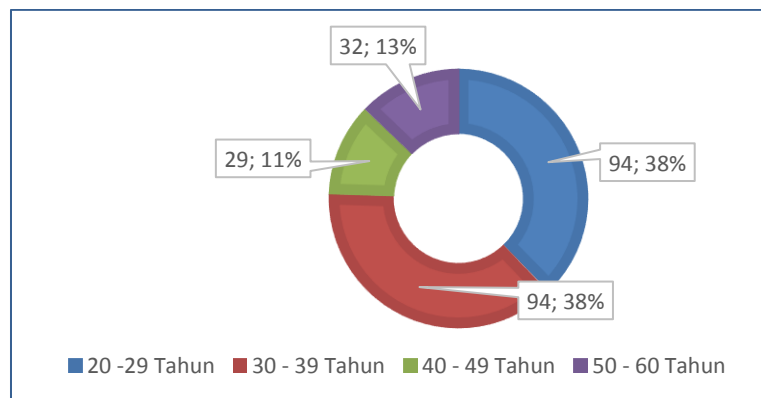
**Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

d. Berdasarkan jabatan:



**Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan**

e. Berdasarkan kelompok umur:



**Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur**

## Anggaran


PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari rupiah murni sebesar Rp80.456.344.000,- (delapan puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp5.501.327.000,- (lima miliar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dikelola untuk program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp47.831.187.000,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 (tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

### 1.5 Isu Strategis Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

#### 1.5.1 Isu Strategis

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi di bidang obat dan makanan menciptakan berbagai jenis dan inovasi produk, seperti bioteknologi (monoklonal anti bodi)/protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); pengembangan probiotik (sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim), kosmetik, nanoteknologi; targeted organ medicine; blood product dan sel punca dan berbagai bahan berbahaya dan cemaran dalam kosmetik dan pangan.
2. Perubahan *life style* masyarakat sehingga konsumsi suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang mungkin saja tidak jelas perolehannya sehingga mutu dan keamanannya diragukan.
3. Masih adanya produk yang mutunya rendah seperti adanya cemaran mikroba, bahan kimia obat dalam obat tradisional sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat
4. Masih adanya permintaan penjelasan oleh pelaku usaha terhadap hasil pengujian BPOM.
5. Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Internasional di bidang obat dan makanan. Menipisnya *entry barrier* perdagangan antar negara dan era perdagangan bebas dunia, semakin membuka akses pasar produk obat dan makanan dalam negeri.
6. Program Sustainable Development Goals (SDGS): Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
7. Program SDGS tujuan 2: Tanpa kelaparan. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berda dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup



sepanjang tahun. Laboratorium BPOM harus ikut serta dalam mencapai tujuan ini, yaitu mengawal dan menjamin keamanan makanan dengan hasil pengujian yang cepat, tepat dan sesuai. Program SDGS tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Air yang digunakan untuk minum dan masak kualitasnya harus diperhatikan, tidak boleh menjadi sumber penyakit atau membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Kualitas air yang digunakan masyarakat terutama air minum harus dapat dijamin keamanannya yang dapat dibuktikan melalui hasil pengujian.

8. ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food Safety. Salah satu program strategis ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food safety pada kegiatan monitoring dan *surveillance* adalah Strengthening laboratory capacity for food safety including the possibilities using ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL).
9. Ketersediaan Baku Pembanding belum memadai. Ketersediaan baku pembanding dari PPPOMN sangat diharapkan oleh industri obat dan makanan agar lebih terjamin mutu dengan harga relatif lebih murah jika harus diimpor.
10. Tuntutan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola proses bisnis, seperti kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan internal PPPOMN dan dukungan layanan publik secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat terhadap layanan publik.

### 1.5.2 Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra PPPOMN 2020-2024, PPPOMN telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi PPPOMN dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang dalam Renstra PPPOMN tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Pandemi COVID-19

Potensi: PPPOMN merupakan satu-satunya laboratorium di Indonesia yang diakui WHO dalam melakukan lot release/pengujian vaksin. Dengan demikian, kondisi pandemi menjadi tantangan PPPOMN untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengujian keamanan dan mutu vaksin COVID-19 yang sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Peran PPPOMN dalam pengujian biomolekuler sangat dibutuhkan untuk mengawal pengujian spesimen COVID-19.

PPPOMN juga melakukan pendampingan kepada Balai Besar/Balai POM dan mendorong agar mampu melakukan pengujian spesimen COVID- 19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi PPPOMN masih sangat terbatas untuk menjawab tantangan era pertumbuhan ekonomi saat ini dengan masuk dan beredarnya vaksin COVID-19 dengan berbagai platform dari luar negeri yang sangat cepat.
- 2) Sulitnya dilakukan pengawalan terhadap pengembangan vaksin di Indonesia dikarenakan untuk melakukan transfer teknologi harus ada perjanjian Kerjasama antara importir/industri vaksin di Indonesia.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat COVID-19, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan vitamin yang diklaim dapat mengobati COVID-19 membutuhkan peran PPPOMN dalam mengembangkan metode analisis dan pengujiannya.

#### b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

PPPOMN diharapkan peran sertanya dalam mendukung dua area reformasi Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu:

- 1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi.  
Kontribusi PPPOMN pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain pengembangan metode analisis obat dan vaksin COVID-19 serta lot release vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV).
- 2) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”, khususnya dalam hal penguatan jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium.  
Kontribusi PPPOMN pada area ini antara lain penguatan kapasitas dan kemampuan uji laboratorium BPOM terutama dalam menjawab tantangan isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, peningkatan kapasitas SDM penguji, implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan, pemenuhan sarana prasarana laboratorium pengujian Obat dan Makanan, pengembangan ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium, serta peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

Permasalahan:

- 1) Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan belum sepenuhnya mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk beredar di Indonesia, terutama dengan munculnya berbagai isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, dan isu Obat dan Makanan lainnya. Demikian juga laboratorium pengujian Obat dan Makanan diluar BPOM belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 2) Masih terbatasnya kapasitas laboratorium BPOM karena belum terpenuhinya seluruh sumber daya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem manajemen laboratorium yang andal. Demikian juga dengan kalibrasi peralatan laboratorium yang masih membutuhkan pengembangan kemampuan kalibrasi sejalan dengan semakin meningkatnya jenis dan jumlah peralatan.
- 3) Masih terbatasnya jenis dan jumlah Baku Pembanding Kimia dan Biologi sesuai kebutuhan untuk mendukung pengujian Obat dan Makanan.

#### c. Regionalisasi Laboratorium

Potensi:

- 1) PPPOMN sebagai sentra laboratorium dari sistem regionalisasi laboratorium BPOM memiliki peran sangat strategis dalam menyusun kebijakan pengujian Obat dan Makanan, menyediakan metode analisis, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem regionalisasi laboratorium, serta memberikan solusi terhadap permasalahan pengujian Obat dan Makanan.
- 2) PPPOMN sebagai Pembina Balai Besar/Balai POM/Loka POM di bidang pengujian Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam penyusunan/revisi Standar Kemampuan Laboratorium sesuai konsep regionalisasi (standar ruang lingkup, standar kompetensi, dan standar peralatan), monitoring dan evaluasi, serta melakukan intervensi pemenuhannya.

Permasalahan:

Berbagai tantangan teknis pengujian Obat dan Makanan yang timbul selama implementasi sistem regionalisasi laboratorium tidak seluruhnya dibawah kendali PPPOMN seperti ketersediaan sarana prasarana/instrument pengujian, dukungan IT, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penguji, dukungan anggaran, dll., sehingga dibutuhkan peran aktif unit kerja terkait.



# BAB II

---

## PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi PPPOMN sejalan dengan Visi BPOM. Visi, Misi, dan Tujuan BPOM

Visi BPOM 2020-2024	Misi BPOM 2020-2024	Tujuan BPOM 2020-2024
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Misi BPOM 2020-2024”	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li><li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li><li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li><li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</li><li>2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</li><li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</li><li>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.</li><li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.</li><li>6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</li><li>7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</li></ol>

Pada Reviu Renstra 2020-2024 Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Misi dan Tujuan PPPOMN menyesuaikan Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

## Misi PPOMN 2020-2024

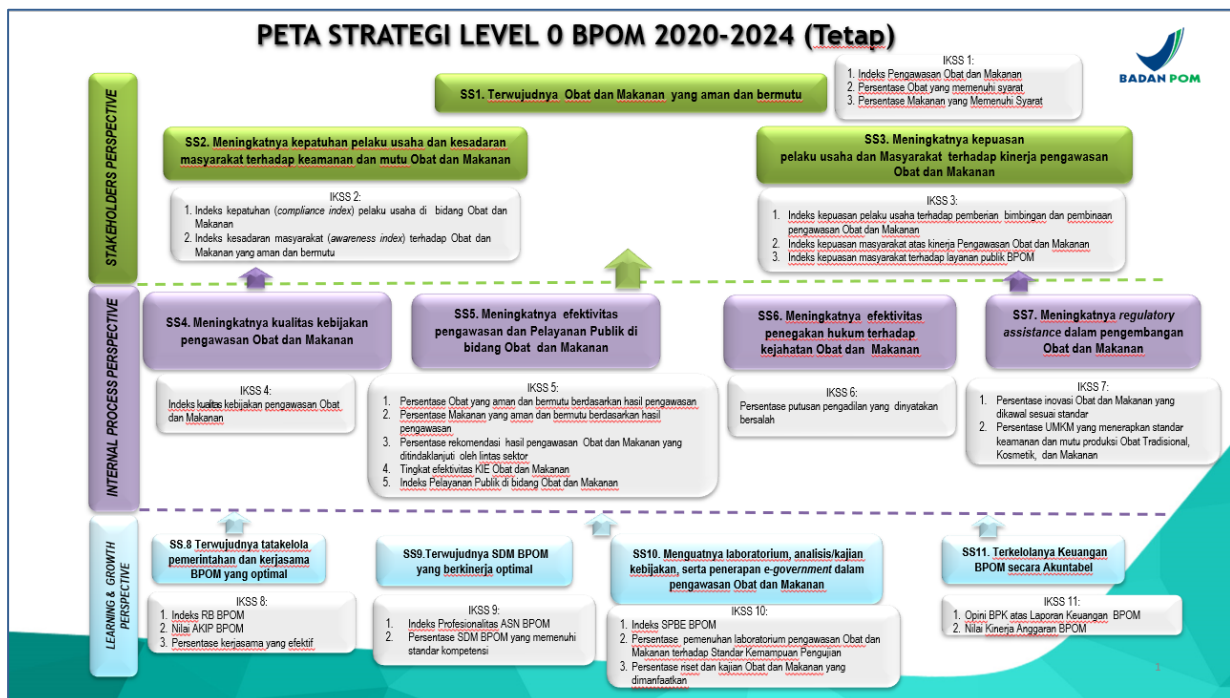
1. Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian

## Tujuan PPOMN 2020-2024

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional.
2. Terwujudnya PPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

### 2.2 Sasaran Strategis

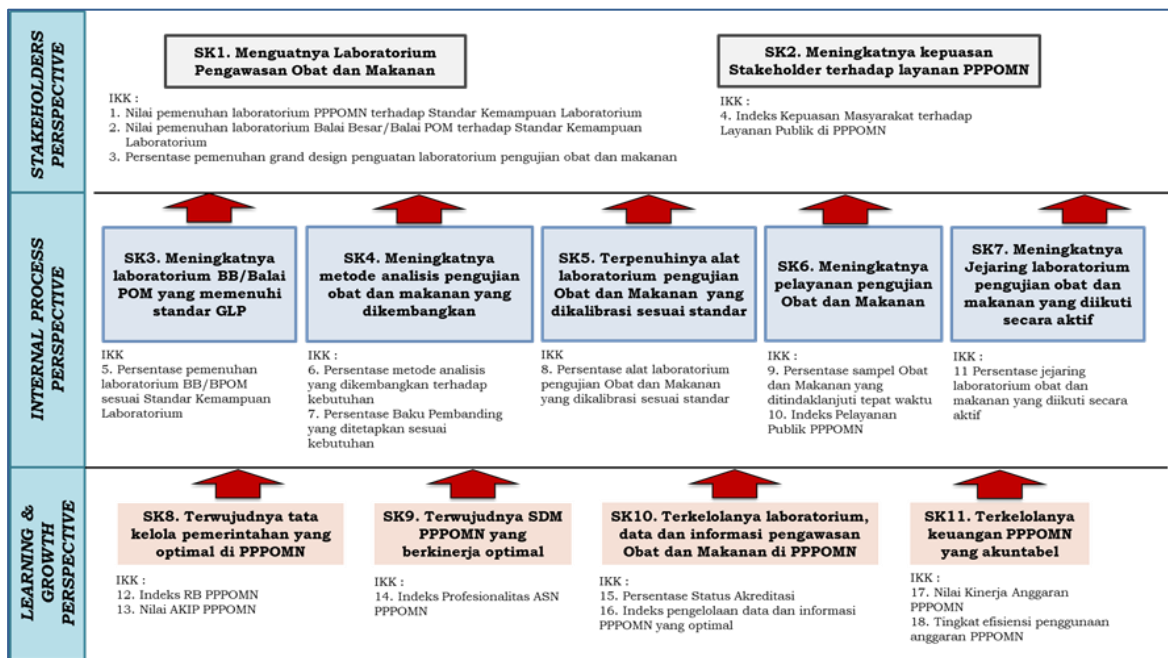
Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:



**Gambar 7. Peta Strategi Level 0 BPOM RI**

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Sasaran strategis PPOMN 2020-2024 disusun berdasarkan peta strategi *balance score card* 3 level perspektif, dengan menurunkan sasaran strategis BPOM perspektif *learning and growth* dan indikatornya ke dalam *stakeholder perspective* peta strategi PPOMN. Dengan sasaran strategis ini maka PPOMN akan berkontribusi pada pengawasan Obat dan Makanan. Peta Strategi Level 2 Satker PPOMN dapat dilihat pada Gambar 8.



**Gambar 8. Peta Strategi Level 2 PPPOMN**  
 Sumber: Renstra PPPOMN 2020-2024

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. PK merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan *monitoring* pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PK disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja eselon II dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN**

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Stakeholder</b>	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	81
		2. Persentase Pemenuhan <i>Grand Design</i> (GD) penguatan laboratorium BPOM	20
	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
<b>Internal Process</b>	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP/SKL	80
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6
		2. Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81,5
	5. Terpenuhinya alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	100
	6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,21
	7. Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71
<b>Learning &amp; Growth</b>	8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	87,6
		2. Nilai AKIP PPPOMN	78,7
	9. Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
	10. Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	1. Persentase status akreditasi	2,25
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	71
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

### 2.3 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun RAPK PPPOMN tahun 2022 sesuai tabel 2.

**Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Standar Kemampuan Laboratorium	76	77	79	81	907.230.000
		2. Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	7	9	12	20	6.039.120.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPOMN	-	-	-	91	3.071.931.000
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	80	3.599.016.000
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,45	77,80	79,35	82,60	4.463.566.000
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	72,94	75,22	78,24	81,50	1.844.838.000
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	25	50	75	100	2.898.800.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	93	93	17.494.800.000
		9. Indeks Pelayanan Publik PPOMN	-	-	-	4,30	2.776.927.000
7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	50	57	64	71	1.748.069.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPOMN	11. Indeks RB PPOMN	-	-	-	87,6	24.612.148.000
		12. Nilai AKIP PPOMN	-	-	-	78,7	753.000.000
9	Terwujudnya SDM PPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	-	-	-	86,25	1.251.174.000
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi	14. Persentase Status Akreditasi	-	-	-	71	497.052.000
	pengawasan Obat dan Makanan di PPOMN	15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	-	-	-	2,25	4.480.960.000
11	Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	65	75	85	94,1	9.519.040.000

## 2.4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Pengukuran Capaian Kinerja dihitung dengan menggunakan dua rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik (hubungan positif), maka rumus yang digunakan:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah (hubungan negatif), maka rumus yang digunakan:







$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = (\% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 + \% \text{capaian}_n) / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara realisasi dan target. Kriteria capaian indikator ditunjukkan dalam range seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

$x$  = capaian kinerja

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.



# BAB III

---

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Laporan Kinerja TW I PPPOMN tahun 2022 disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi kegiatan dalam tahun 2022. PPPOMN telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator kinerja. Pencapaian kesebelas sasaran strategis PPPOMN tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022**


Sasaran Strategis Indikator		Target Tahun 2022	Target TW 1	Satuan	Realisasi	Capaian thd Target TW 1	Capaian thd target tahunan
<b>Sasaran Strategis 1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan</b>							
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81	76	%	73,25	96,38	90,432
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	20	7	%	7	100	35
<b>Sasaran Strategis 2. Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN</b>							
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91	-	nilai	-	-	Akhir tahun
<b>Sasaran Strategis 3. Meningkatkan laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP</b>							
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	80		%	-	-	Akhir tahun
<b>Sasaran Strategis 4. Meningkatkan metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan</b>							
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	76,55	%	75,78	99,06	91,74
2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81,5	72,94	%	73,27	100,45	89,90
<b>Sasaran Strategis 5. Meningkatkan alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar</b>							
1	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	100	25	%	24,4	97,4	24,4
<b>Sasaran Strategis 6. Meningkatkan pelayanan pengujian Obat dan Makanan</b>							
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindak lanjut tepat waktu	93	93	%	100	107,53	107,53
2	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,21		Nilai			Akhir tahun

Sasaran Strategis Indikator		Target Tahun 2022	Target TW 1	Satuan	Realisasi	Capaian thd Target TW 1	Capaian thd target tahunan
<b>Sasaran Strategis 7. Meningkatkan Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif</b>							
1	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71	50	%	50	100	70,42
<b>Sasaran Strategis 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPOMN</b>							
1	Indeks RB PPOMN	87,6	-	Nilai	-	-	Akhir tahun
2	Nilai AKIP PPOMN	78,7	-	Nilai	-	-	Akhir tahun
<b>Sasaran Strategis 9. Terwujudnya SDM PPOMN yang berkinerja optimal</b>							
1	Indeks profesionalitas ASN PPOMN	86,25	-	Indeks	-	-	Akhir tahun
<b>Sasaran Strategis 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPOMN</b>							
1	Status akreditasi	71	-	Nilai	-	-	Akhir tahun
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	2,25	2,25	Nilai	2,75	122,22	122,22
<b>Sasaran Strategis 11. Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel</b>							
1	Nilai kinerja anggaran PPOMN	94,1	65	%	56,47	86,88	60,01

**Sasaran Strategis 1:  
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan**

**IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian**

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai Besar/Balai POM dan PPOMN pada tahun 2020 dan 2021. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.



Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efisiensi dan efektivitas” laboratorium pengujian baik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) maupun BB/Balai POM dan Loka POM. Oleh karena itu, mulai tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru, yaitu “Regionalisasi Laboratorium” dengan mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh region yaitu:

1. **Region Padang** dengan anggota BB/Balai POM di Padang, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu
2. **Region Pekanbaru** dengan anggota BB/Balai POM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang
3. **Region DKI Jakarta** dengan anggota BB/Balai POM di DKI Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Serang
4. **Region Samarinda** dengan anggota BB/Balai POM di Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan
5. **Region Makassar** dengan anggota BB/Balai POM di Makassar, Jayapura, Manokwari, Kendari, Mamuju
6. **Region Manado** dengan anggota BB/Balai POM di Manado, Gorontalo, Palu, Ambon, Sofifi
7. **Region Denpasar** dengan anggota BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang.

Dengan adanya program Regionalisasi Laboratorium ini, maka Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan menyesuaikan penugasan pengujian yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan program Regionalisasi pada tahun 2022 di 34 Balai Besar/Balai POM perlu adanya pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif sebagai awal pelaksanaan regionalisasi laboratorium BPOM dari PPPOMN maupun unit yang terkait di Badan POM yaitu Pusdatin, Biro Perencanaan maupun dari Kedeputan dan Inspektorat.

Untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.04.22.74 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Cara perhitungan persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah rata-rata nilai pemenuhan SKL

PPPOMN dengan bobot 40% dan rata-rata nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dengan bobot 60%. Nilai pemenuhan SKL PPPOMN dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing laboratorium (Kimia Obat, Bahan Obat dan NAPPZA, Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Kimia Pangan Olahan dan Air, Baku Pembanding, Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Pengujian Khusus Obat & Makanan serta Balai Kalibrasi). Nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing Balai.

Pada tahun 2022 target indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81%, dengan target Nilai SKL PPPOMN adalah 83.8% dan target Nilai SKL Balai Besar/Balai POM adalah 79.1%.

Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian dilakukan mulai TW I melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM dilakukan setiap triwulan. Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2022 yaitu 81%.

#### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 73,25%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja Triwulan I tahun 2022, maka capaian indikator kinerja ini adalah 96,38%.

$$\% \text{ Realisasi IKSS} = 73,25\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{73,25}{76} \times 100\% = 96,38\%$$

Dilakukan Pemutakhiran data capaian pemenuhan SKL pada 18 April 2022, maka untuk realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 75,99% yang terdiri dari realisasi nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sebesar 74,06%, dan realisasi nilai pemenuhan SKL PPPOMN sebesar 78,88%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja Triwulan I tahun 2022, maka capaian indikator kinerja ini adalah 99,99%.

% Realisasi IKSS = 75,99%

% Capaian IKSS =  $\frac{75,99}{76} \times 100\% = 99,99\%$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{73,25}{81} \times 100\% \\ &= 90,432 \%\end{aligned}$$

Capaian kinerja terhadap target tahun 2022 hasil pemutakhiran data per 18 April 2022:

$$\begin{aligned}\%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{75,99}{81} \times 100\% \\ &= 93,81 \%\end{aligned}$$

Tabel 5. Capaian SKL PPPOMN TW 1 Tahun 2022

SKL	KOBONAPPZA	OTOKSKK	KPOA	MBM	BBP	BPPB	BPKOM	Balai Kalibrasi
	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I
Ruang Lingkup	71,63	81,43	72,00	69,64	69,91	64,80	70,94	78,13
Kompetensi	86,00	92,48	87,00	89,52	82,82	92,00	91,40	58,21
Peralatan	82,10	82,60	69,00	72,57	76,82	82,96		79,26
Rata-Rata	79,91	85,50	76,00	77,24	76,52	79,92	81,17	71,87
Target 2022	83,80							
Capaian 2022	78,88							

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

PPPOMN sebagai unit pembina teknis laboratorium BPOM melakukan penilaian terhadap Standar Kemampuan Laboratorium BPOM tahun 2022. Beberapa kendala dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Belum seluruh data monitoring dan evaluasi SKL diperoleh sesuai waktu yang telah ditetapkan
- Adanya mutasi/ perpindahan staf pengujian ke fungsi lain internal maupun eksternal pengujian.
- Pemenuhan Standar peralatan laboratorium di Balai POM terkait Regionalisasi perlu dilakukan evaluasi kembali agar efektivitas bisa terpenuhi secara optimal.

#### Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Dalam melakukan monitoring evaluasi akan dilaksanakan minimal 1 minggu sebelum batas akhir triwulan, agar data dapat ditarik sebelum batas pelaporan.
- Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring pemenuhan SKL Balai POM secara intensif sesuai dengan pemenuhan standar sesuai Regionalisasi Laboratorium
- Perlu dilakukan review terhadap road map pemenuhan SKL yang telah disusun menyesuaikan program Regionalisasi Laboratorium.

#### IKSS 1.2 Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM

Penyusunan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM merupakan strategi dalam rangka memperkuat laboratorium. *Grand Design* (GD) memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Pada tahun 2021 telah terpenuhi target 5% berupa tersusunnya dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *Grand Design* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Target pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM tahun 2022 adalah sebesar 15% yang meliputi kegiatan:

- Penyusunan tim dan pedoman Green Laboratory serta kajian Green Laboratory (3%)
- Penyusunan tim dan pedoman Digital Laboratory (7%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (2%)
- Pembinaan BB/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan SKL (2%)
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (0,5%)
- Peningkatan Ruang Lingkup (0.5%)

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022, target pada triwulan (TW) I untuk indikator ini adalah 7%. Adapun pencapaian target indikator pada TW1 tahun 2022 ini sebesar 7% yaitu

- Dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium pengawasan obat dan makanan (5%) pada tahun 2021
- Dokumen Penyusunan tim dan pedoman Digital Laboratory (1%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (0,5%) berupa 1 kegiatan
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (0,5%)

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN), sehingga target indikator sampai dengan tahun 2022 adalah 20%. Pemenuhan target *grand design* pada TW I adalah 7%. Perhitungan realisasi target indikator persentase *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM pada TWI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Persentase Grand Design terealisasi pada TW I tahun 2022}}{\text{Persentase Target Grand Design sampai dengan tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= 7/20 \times 100\%$$

$$= 35\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{7\%}{7\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\%IKSS = \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{20} \times 100\%$$

$$= 35\%$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

**Keberhasilan**

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin sehingga kegiatan terlaksana sesuai perencanaan.

**Rencana tindak lanjut**

Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan.

**Sasaran Strategis 2:**  
**Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan  
PPOMN**

**IKSS 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPOMN**

Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam hal pelayanan publik, PPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri obat dan makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan stakeholder eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPOMN. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, PPOMN melakukan pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Whole Genome Sequencing (WGS) sampel spesimen COVID-19 dari berbagai pihak.

**a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022**

Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPOMN akan dihitung di akhir tahun 2022 dengan target sebesar 91. Oleh karena itu capaian di triwulan I belum dapat di tetapkan. Namun dalam upaya peningkatan pelayanan publik, PPOMN senantiasa melakukan survei umpan balik pelanggan pengguna layanan. Survei umpan balik dilakukan setelah pelanggan menerima layanan publik dengan membagikan link berbasis *google drive* dengan nama SIKEPO (Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Online) dengan alamat: [bit.ly/SurveiPPOMN](https://bit.ly/SurveiPPOMN). Penilaian atas kualitas pelayanan dan saran serta masukan dari pelanggan menjadi landasan bagi PPOMN untuk melakukan perbaikan dan inovasi agar selalu memberikan pelayanan publik yang prima.

SKM jumlah data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6, Nilai SKM tiap jenis layanan dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 6. Jumlah Responden SKM Berdasarkan Jenis Layanan**

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
1	Layanan Pembelian Baku Pembanding BPFi	18
2	Layanan Jasa Kalibrasi	16
3	Layanan Jasa Pengujian	23
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	6
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	6
6	Layanan Jasa Uji Profisiensi	19
7	Layanan Jasa Pelatihan	82
<b>Jumlah</b>		<b>170</b>

**Tabel 7. Nilai SKM Tiap Jenis Layanan**

No	Jenis Layanan	Nilai SKM
1	Layanan Pembelian Baku Pembanding BPFi	91,94
2	Layanan Jasa Kalibrasi	89,70
3	Layanan Jasa Pengujian	90,23
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	93,83
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	89,51
6	Layanan Jasa Uji Profisiensi	91,55
7	Layanan Jasa Pelatihan	87,72
<b>Rata-rata</b>		<b>90,64</b>

Kategori Nilai SKM:

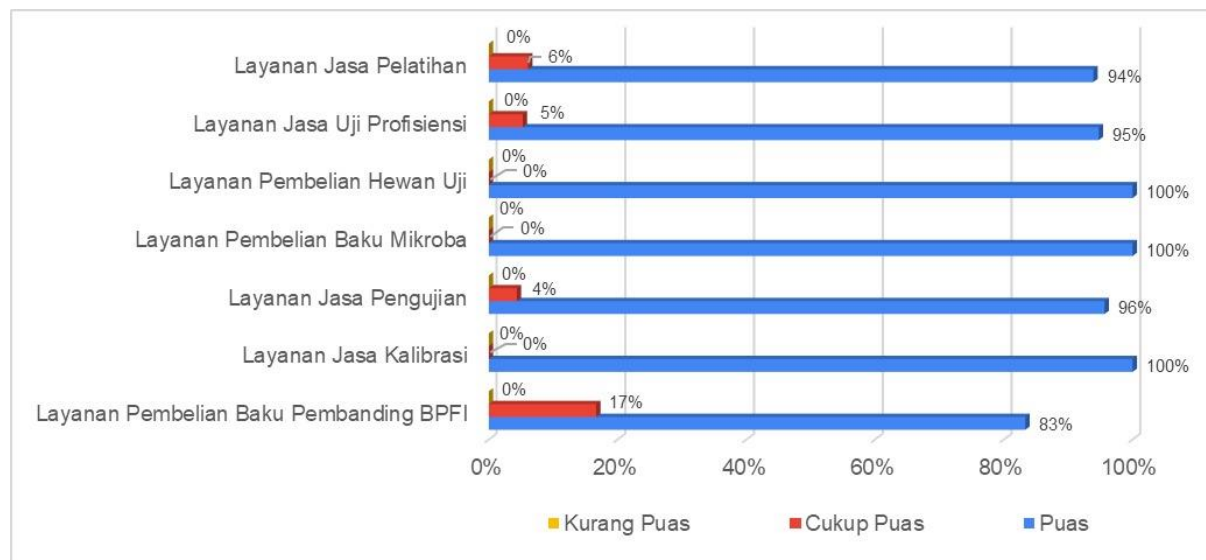
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100,00
Mutu Pelayanan B (Baik)	:	76,61 – 88,30
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)	:	65,00 – 76,60
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)	:	25,00 – 64,99

Nilai SKM tiap jenis layanan yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 170 orang berkisar antara 87,72 – 93,83 dengan hasil pelayanan secara umum PUAS. Nilai SKM terendah pada Layanan Jasa Pelatihan dan tertinggi pada Layanan Pembelian Baku Mikroba. Rata-rata nilai SKM dari tujuh jenis layanan adalah **90,64** masuk dalam kategori Mutu Pelayanan **A (Sangat Baik)**.

**Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan**

No.	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Rata-rata
1	Layanan Pembelian Baku Pembanding BPFi	92,59	91,67	91,36	94,44	88,89	92,59	94,44	91,67	89,81	91,94
2	Layanan Jasa Kalibrasi	86,46	89,58	88,54	90,63	89,58	92,71	92,71	88,54	88,54	89,70
3	Layanan Jasa Pengujian	89,13	89,13	89,61	91,30	91,30	90,58	92,03	89,86	89,13	90,23

No.	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Rata-rata
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	91,67	91,67	88,89	94,44	97,22	97,22	97,22	91,67	94,44	93,83
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	91,67	88,89	88,89	88,89	86,11	91,67	91,67	88,89	88,89	89,51
6	Layanan Jasa Uji Profisiensi	92,98	92,98	89,77	92,11	92,98	92,98	92,11	89,47	88,60	91,55
7	Layanan Jasa Pelatihan	87,80	88,01	87,26	87,40	87,80	88,01	89,43	87,40	86,38	87,72
Rata-Rata		90,33	90,28	89,19	91,32	90,55	92,25	92,80	89,64	89,40	90,64



**Gambar 9. Kepuasan Pelayanan Secara Umum**

**Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik**

Jenis Layanan		Saran dan Masukan	
1	Layanan Pembelian Baku Pembanding BPFI	1	Menyediakan baku pembanding impurities
		2	Metode pembayarannya sepertinya bisa lebih detail, seperti penggunaan m-banking setiap banknya yang harus menuju menu pembelian/pembayaran dan seterusnya.
		3	Perbanyak item baku pembanding terutama untuk impurity nya.
		4	Mohon ke depannya dapat disediakan baku pembanding yang sulit diperoleh dan harganya cukup mahal.
		5	Pelayanan agar ditingkatkan menuju pelayanan prima
		6	Agara informasi terkait Ketersediaan baku bisa lebih diperjelas, misal ada baku yang di hold atau masih dalam tahap verifikasi agar dapat diinformasikan dalam aplikasi Infalabs.
		7	Lebih ditingkatkan kembali.
		8	Menambah lagi persediaan baku pembanding.
		9	Status pengiriman sampel di aplikasi kadang masih kurang update.
2	Layanan Jasa Kalibrasi	1	Ke depan agar dapat ditingkat pelayanan untuk kalibrasi thermohyrometer dan mikropipet.
		2	Membuat sistem yang mempermudah perolehan informasi untuk kebutuhan UPT, seperti sms (misal pilih 1 untuk uji profisiensi, 2 untuk kalibrasi).

Jenis Layanan		Saran dan Masukan	
		3	Agar terus dipertahankan.
		4	Penambahan ruang lingkup sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
		5	Tingkatkan pelayanan menuju pelayanan prima.
		6	Dipertahankan.
3	Layanan Jasa Pengujian	1	Tetap dipertahankan.
		2	pelayanan memuaskan, harus dipertahankan.
		3	Jika ada yg ditanyakan agar lebih cepat jawabannya.
		4	Pemberian informasi ke pelanggan lebih ditingkatkan lagi.
		5	Informasi kontak person untuk menanyakan hal-hal yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah.
		6	Ditingkatkan terus pelayanannya.
		7	Agar tetap memberikan pelayanan prima kepada konsumen.
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	1	Pengiriman pesanan (untuk mikroba) sebaiknya dilakukan lebih cepat.
		2	Untuk dipertahankan, pengiriman sudah cepat.
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	1	Sudah baik, terus tingkatkan.
		2	Pemberian informasi jika hewan coba sudah akan tersedia setidaknya H-7. Sangat cepat dan sangat puas.
		3	Lebih ditingkatkan dalam hal memberikan respon pertanyaan, agar lebih optimal.
		4	Supaya kedepannya kode pembayaran bisa cepat di keluarkan.
		5	Menyediakan nomor rekening untuk pembayaran, dikarenakan banyak yang bingung membayar melalui ATM dengan kode billing.
6	Layanan Jasa Uji Profisiensi	1	Agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan lagi.
		2	Uji profisiensi bisa mengakomodir parameter kritis di pedoman sampling.
		3	Tingkatkan pelayanan menuju pelayanan prima.
		4	Pertahankan kualitas yang sudah baik.
		5	Izin mengusulkan mengadakan tema UP narkotika dengan zat aktif sampel yang sering di terima dari pihak ketiga kepolisian.
		6	Hasil evaluasi Uji Profisiensi terlalu lama.
		7	Meningkatkan layanan lebih baik lagi, terutama layanan UP ke Balai sebaiknya didiskusikan bersama parameter yang akan di UP kan
		8	Pelayanan yang sudah baik dipertahankan
		9	Untuk layanan menu pendaftaran Uji Profisiensi agar lebih dipermudah lagi, masih agak membingungkan.
		10	Makin ditingkatkan pelayanan kepada pelanggan.
		11	Pelayanan Uji Profisiensi sudah baik agar lebih ditingkatkan lagi sehingga semakin lebih baik lagi.
7	Layanan Jasa Pelatihan	1	Pertahankan dan tingkatkan.
		2	Sering adakan pelatihan terutama untuk Loka terkait test kit.
		3	Semoga lebih baik.
		4	Terus ditingkatkan dan lakukan pelatihan secara berkala.
		5	Pelayanan terus ditingkatkan.

Jenis Layanan	Saran dan Masukan
	6 Sudah baik dan bisa lebih ditingkatkan lagi frekuensi untuk pelatihan bagi pegawai di UPT.
	7 Pelatihan yang diadakan agar minta data ke BPOM di daerah tentang jenis pelatihan yang dibutuhkan daerah.
	8 Tingkatkan kinerja.
	9 Tingkatkan menjadi lebih baik.
	10 semoga lebih baik lagi.
	11 Semoga ke depan dapat lebih sering diadakan pelatihan/webinar terkait teknis dan manajemen laboratorium.
	12 Tingkatkan lagi pelayanannya.
	13 Baik untuk dipertahankan.
	14 Semoga menjadi lebih baik.
	15 Pelayanan sudah baik, pertahankan terus.
	16 Tingkatkan kinerja.
	17 Teruslah memberikan pelayanan terbaik.
	18 Agar dilakukan monev berkala terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian regionalisasi, agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat segera diantisipasi.
	19 Kompetensi tentang pengujian untuk Pegawai di Loka POM agar terus dikembangkan.
	20 Pelayanan telah baik, tingkatkan lagi.
	21 Dipertahankan.

**Sasaran Strategis 3:**  
**Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP**

### IKSS 3. Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP

GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari *cut off* ( $\geq 70\%$ ). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024.

Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL BB/BPOM dilakukan pada akhir tahun. Cara perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Hitung persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium (rata-rata dari SRL, alat dan kompetensi) untuk masing-masing BB/BPOM
2. Hitung jumlah BB/BPOM yang memenuhi standar kemampuan laboratorium dengan nilai rata-rata  $\geq 70\%$  (*cut off*) menggunakan standar kemampuan laboratorium (2020-2024)
3. Jumlah BB/BPOM yang memiliki nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium  $\geq 70\%$  dibagi jumlah keseluruhan BB/BPOM (34 BB/BPOM).

Dari monitoring dan evaluasi SKL pada Triwulan I tahun 2022, didapatkan pemenuhan/capaian SKL di atas 70% untuk 30 Balai POM dari 34 BB/BPOM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja ini tetap mengacu pada target sebelumnya yaitu 80% atau 27 BB/BPOM.

**Tabel 10. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Triwulan I Tahun 2022**

No.	Balai Besar/Balai POM	Hasil Monev Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2022			
		Triwulan I			
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
1	Aceh	79,66	80,94	74,18	78,26
2	Ambon	76,91	84,46	62,53	74,64
3	Bandar Lampung	79,48	86,86	66,92	77,75
4	Bandung	82,01	81,04	75,20	79,42
5	Banjarmasin	77,31	83,84	68,21	76,45
6	Batam	77,20	84,14	59,17	73,50
7	Bengkulu	74,54	83,49	84,53	80,85
8	Denpasar	80,80	89,10	75,60	81,83
9	DKI Jakarta	80,96	90,85	74,90	82,24
10	Gorontalo	75,25	75,64	69,98	73,62
11	Jambi	73,65	84,86	62,05	73,52
12	Jayapura	68,11	81,10	73,28	74,16
13	Kendari	73,60	89,49	65,24	76,11
14	Kupang	80,62	89,26	74,77	81,55
15	Makassar	74,71	80,11	71,01	75,28
16	Mamuju	40,16	57,91	28,34	42,14
17	Manado	74,34	85,82	69,54	76,57
18	Manokwari	67,79	76,75	50,36	64,97
19	Mataram	86,59	91,41	75,60	84,53
20	Medan	79,34	88,13	68,00	78,49
21	Padang	79,77	90,22	77,71	82,57
22	Palangkaraya	73,77	90,03	79,46	81,09
23	Palembang	82,97	83,85	66,85	77,89
24	Palu	78,25	87,24	73,77	79,75
25	Pangkalpinang	80,09	84,87	70,98	78,65
26	Pekanbaru	74,07	87,24	82,77	81,36
27	Pontianak	79,45	79,72	71,86	77,01
28	Samarinda	81,43	83,13	70,56	78,37
29	Semarang	80,63	85,32	78,85	81,60
30	Serang	82,00	91,70	78,51	84,07
31	Soffi	24,53	33,60	10,31	22,82
32	Surabaya	81,36	81,87	77,46	80,23
33	Yogyakarta	81,17	89,02	76,89	82,36
34	Tarakan	1,83	51,97	19,77	24,53
	<b>Rata-rata</b>	73,07	81,91	67,21	74,06

a. **Progres Indikator Kinerja pada TW 1 Tahun 2022**

Hasil penilaian standar kemampuan laboratorium BPOM berdasarkan tabel 10 terdapat 30 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70% (*cutt-off* 70%). Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 27 BB/Balai POM yang memperoleh nilai SKL > 70%.

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{30}{34} \times 100\% = 88,24\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{88,24}{80} \times 100\% = 110,29\%$$

b. **Progres Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022**

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{88,24}{80} \times 100\% \\ &= 110,29\% \end{aligned}$$

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut**

Di tahun 2022 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan sehingga dapat memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala pemenuhannya. Beberapa intervensi yang dilakukan oleh PPPOMN antara lain peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis secara hybrid (daring dan luring) serta mengikutsertakan dalam uji kolaborasi dan uji profesiensi untuk meningkatkan ruang lingkup pengujian.

**Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 4 Balai POM di Jambi, Manokwari, Sofifi dan Mamuju yang nilai SKL-nya masih dibawah 70%.

- PPPOMN melakukan program pendampingan yang lebih intensif kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian.
- Memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan peningkatan SKL.
- Penyusunan perencanaan peningkatan SKL, monitoring pelaksanaan, evaluasi dan memberikan solusi pemenuhan sesuai target yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 4:**  
**Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan**

**IKSS 4.1 Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan**

Indikator sasaran strategis ini adalah persentase Metode Analisis (MA) yang dikembangkan terhadap kebutuhan. MA yang dikembangkan oleh PPPOMN (validasi/verifikasi) digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler, produk biologi, serta pengelolaan hewan percobaan.

Indikator persentase MA yang dikembangkan, diukur dengan penambahan MA yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah tahun sebelumnya, kemudian dihitung peningkatannya terhadap total target MA yang akan dicapai pada tahun 2024 sejumlah 2.213 judul MA (100%). Jumlah tersebut didapat dengan penyesuaian target akibat terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Target persentase capaian akumulasi jumlah MA di tahun 2022 adalah 82,6% dan 76,5% sampai dengan Maret 2022 (TW1 2022), dari target 100% pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan antara 4 (empat) Kelompok Substansi (Poksi) dan 1 (satu) UPT di bawah PPPOMN dengan Kepala PPPOMN pada tanggal 4 Januari 2022, maka ditetapkan target jumlah Metode Analisis (MA) yang dikembangkan PPPOMN tahun 2022 adalah 200 MA. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (60 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (43 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan Olahan dan Air sebanyak (39 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (43 MA); dan Balai Pengujian Produk Biologi (15 MA).

Sampai dengan bulan Maret 2022 (TW1), terdapat penambahan 26 judul MA atau total akumulasi MA menjadi 1677. Sesuai dengan penambahan tersebut, maka realisasi capaian TW1 sebesar 75,78% dari total target (100%) pada 2024. Persentase tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Realisasi capaian TW1 2022	=	Jumlah MA (sebelumnya + tahun 2021 + TW1 2022)	x 100 %
		Total MA 2024	
	=	1473 + 178 + 26	x 100 %
		2213	
	=	<b>75,78 %</b>	

Berdasarkan realisasi capaian di atas, maka persen capaian TW1 terhadap target sampai dengan Maret 2022 adalah 99,06% dan terhadap target tahunan (2022) adalah 91,74%. Persen capaian tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

% capaian terhadap target TW1 2022	=	Realisasi capaian TW1 2022	x 100 %
		Target capaian TW1 2022	
	=	75,78 %	x 100 %
		76,50 %	
	=	<b>99,06 %</b>	

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

% capaian terhadap target Tahun 2022	=	Realisasi capaian TW1 2022	x 100 %
		Target capaian tahun 2022	
	=	75,78 %	x 100 %
		82,60 %	
	=	<b>91,74 %</b>	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persen capaian terhadap target TW1 2022 (99,06 %) terhitung sudah cukup tinggi, walaupun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tahapan dalam proses validasi atau verifikasi untuk menghasilkan suatu MA. Semua tahapan yang terdiri atas pengajian pustaka, penyusunan rancangan, optimasi metode, pengujian MA, penganalisisan hasil pengujian, dan pengevaluasian MA bersama narasumber harus dilakukan secara berurutan dan komprehensif. Masing-masing tahapan juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pada triwulan selanjutnya, diharapkan persen capaian terhadap target TW2 2022 akan lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut

Setiap tahapan akan dilakukan sesuai dengan *time table* yang telah dibuat untuk masing-masing MA.

## IKSS 4.2 Persentase Baku Pemanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan

Persentase Baku Pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan merupakan Baku Pemanding kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian Obat dan Makanan, yang dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas.

Indikator persentase baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan penambahan baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah baku pemanding tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap total target baku pemanding yang akan dicapai pada tahun 2024.

Baku pemanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada tahun 2022 sebanyak 8 Baku Pemanding kimia dan 6 baku pemanding mikroba. Pencapaian realisasi Baku Pemanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada TW I tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Pencapaian realisasi Baku Pemanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada TW 1 Tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{a+b+c}{d} \times 100\% \\ &= \frac{885+6+9}{1227} \times 100\% \\ &= 73,27\end{aligned}$$

Keterangan:

a = Total baku pemanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2021

b = Total baku pemanding kimia yang dikembangkan pada TW I Tahun 2022

c = Total baku pemanding mikroba yang dikembangkan pada TW I Tahun 2022

d = Total baku pemanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2024

Persentase capaian IKSS pada triwulan I dihitung terhadap realisasi pemenuhan baku pemanding diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{IKSS} &= \frac{\% \text{realisasi}}{\% \text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{73,27}{72,94} \times 100\% \\ &= 100,45 \%\end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{73,27}{81,5} \times 100\% \\ &= 89,90\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Analisis Keberhasilan**

Target Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan TW I tahun 2022 adalah 72,94%. Realisasi pemenuhan baku pembanding TW I tahun 2022 sebesar 73,27% yang berarti target tercapai. Hal ini karena ketersediaan bahan baku dan baku primer, pengadaan bahan baku dan baku primer/reagensia/suku cadang, dan proses pengujian untuk pengembangan baku pembanding masih berjalan sesuai dengan perencanaan.

**Sasaran Strategis 5:**  
**Terpenuhinya Alat Laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sesuai Standar**

IKSS 5. Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar

Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat dan target sebesar 100% (3.154 alat) untuk tahun 2022. Pada triwulan I, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 768 alat dengan capaian sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Sampai dengan TW I, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 892 alat dengan capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100 \% \\ &= \frac{768}{3154} \times 100\% = 24,4 \% \end{aligned}$$

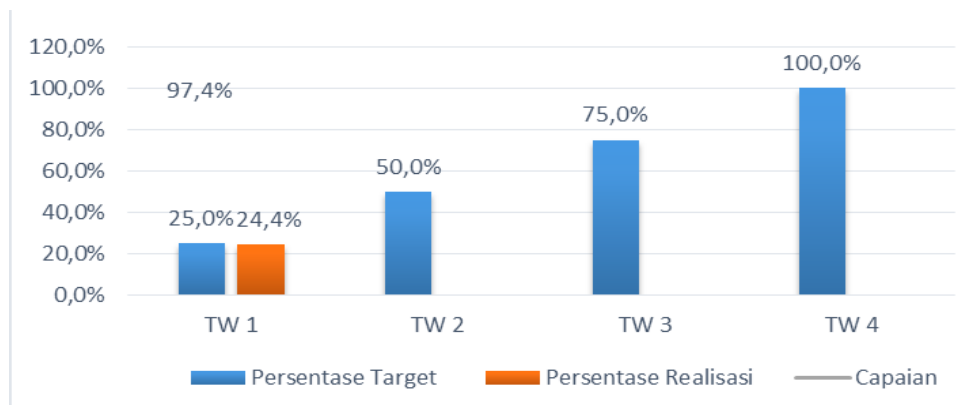
Berdasarkan RAPK, target persentase alat yang dikalibrasi pada TW I sebesar 25 % dari target akhir tahun 2024. Maka dapat dihitung % Capaian Indikator ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{24,4}{25} \times 100\% = \mathbf{97,4\%} \end{aligned}$$

Sampai TW I, telah dilakukan kalibrasi dengan rincian seperti pada Tabel 15.

**Tabel 15. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan I Tahun 2022**

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
<b>1. Januari</b>		<b>327</b>
	DKI JAKARTA	83
	JAMBI	53
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	6
	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	33
	PPPOMN - BBP	11
	PPPOMN - KOBONAPPZA	31
	PPPOMN - MBM	35
	PPPOMN - OTSKKOS	23
	PPPOMN - PANGAN & AIR	10
PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	44	
<b>2. Februari</b>		<b>299</b>
	JAYAPURA	7
	PALANGKARAYA	62
	PALU	76
	PEKANBARU	76
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	16
	SAMARINDA	46
	TARAKAN	16
<b>3. Maret</b>		<b>140</b>
	BANDA ACEH	59
	JAYAPURA	9
	MATARAM	66
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	6



**Gambar 10. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi**

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{24,4}{100} \times 100\% \\ &= 24,4 \%\end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Target kalibrasi peralatan pada TW 1 yaitu 25%, sedangkan capaiannya 24,4%. Terdapat gap 0,6% antara realisasi dengan capaian triwulan I. Hal ini disebabkan penambahan ruang lingkup kalibrasi belum diakreditasi sehingga penambahan jumlah alat yang dikalibrasi tidak sesuai dengan yang direncanakan.


Rencana tindak lanjut

Balai Kalibrasi menindaklanjuti penambahan ruang lingkup yang status akreditasinya belum disetujui agar dapat mencapai target sesuai perencanaan. Harapannya di TW 3 dan 4 penambahan ruang lingkup tersebut sudah disetujui dan dapat menambah jumlah alat yang dikalibrasi.

**Sasaran Strategis 6:  
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan**

**IKSS 6.1 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu**

Pelayanan pengujian obat dan makanan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPPOMN. Persentase sampel obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian obat dan makanan di PPPOMN. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2020, pengujian sampel yang masuk di PPPOMN diuji oleh 2 (dua) UPT PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM), namun hal ini dikecualikan untuk sampel obat dalam rangka WHO Prequalification (PQ WHO) yang diuji oleh Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif serta sampel dalam rangka jejaring pada masing-masing Kelompok substansi pengembangan pengujian di lingkungan PPPOMN.



UPT BPPB mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengujian mutu produk biologi, pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin dan produk biologi lainnya, pelaksanaan pengujian toksikologi obat dan makanan serta sistem rujukan laboratorium untuk pengujian produk biologi dan pengujian toksikologi. Sementara itu, UPT BPKOM melaksanakan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, dan/atau pengkajian obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional serta pelaksanaan pengujian rujukan kimia termasuk sampel rokok, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional.

Sampel yang diterima oleh UPT di Lingkungan PPPOMN adalah:

1. Sampel dari Direktorat Pengawasan karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya), perbedaan hasil uji antar laboratorium UPT BPOM dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sampel dari Deputi IV dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Sampel dari UPT BPOM adalah sampel yang belum mampu diuji di semua UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/investigasi, sampel uji absah DNA, dan vaksin dalam rangka pengawasan.
4. Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/investigasi dan *lot release*.
5. Pengujian dalam rangka pengkajian obat dan makanan.

Hasil pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT BPPB dan BPKOM digunakan untuk tindak lanjut pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga pemenuhan timeline pengujian menjadi sangat penting.

#### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Pada tahun 2022 PPPOMN menargetkan sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sejumlah 1.900 sampel dengan target persentase pemenuhan timeline 93%. Sampai dengan 31 Maret 2022 data sampel tersaji sebagai berikut:

Tabel 17. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	UPT/ POKSI	Jumlah Sampel Masuk	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	BPPB	297	261	261	100%
2	BPKOM	109	88	88	100%
3	KOBONAPPZ A (WHO-PQ)	64	60	60	100%
<b>Total</b>		470	409	409	100%

Perhitungan realisasi dengan target TW 1 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline}}{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji}} \times 100\% \\ &= \frac{409}{409} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{93\%} \times 100\% \\ &= 107,53\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{100}{93} \times 100\% \\ &= 107,53\% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persentase penyelesaian pengujian sampel obat dan makanan serta produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW I Tahun 2022 memiliki persentase realisasi sebesar 100 % dengan persentase capaian IKK sebesar 107,53 %. Pada TW I ini capaian persentase realisasi sudah melebihi target.

## Pengujian specimen COVID-19

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19, maka PPPOMN memiliki satu tugas tambahan, yaitu melaksanakan pemeriksaan pada spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19. Pada TW I tahun 2022 jumlah spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 untuk pengujian PCR sebanyak 9.985 sampel dan untuk pengujian Whole Genome Sequencing (WGS), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus COVID-19 sebanyak 445 sampel.

## IKSS 6.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek, yang meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan dengan bobot 30%;
2. Profesionalisme SDM dengan bobot 18%;
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
5. Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 15%; dan
6. Inovasi dengan bobot 7%.

Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN pada tahun ini sebesar 4,30, dimana Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini akan diukur di akhir tahun.

### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Capaian Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022.

**Sasaran Strategis 7:**  
**Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif**

**IKSS 7. Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif**

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/keahlian.

Sesuai Review Renstra PPPOMN 2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021 dan dituangkan dalam RAPK tahun 2022, target jejaring yang diikuti secara aktif oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah 71% dari 14 jejaring yang menjadi target di akhir RPJMN atau sebanyak 10 jejaring laboratorium. Sepuluh jejaring laboratorium tersebut yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)
8. Jejaring ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC)
9. Jejaring ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives
10. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)

Sesuai definisi operasional, yang dimaksud dengan “diikuti secara aktif” adalah penyelenggaran/keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi; Uji Kolaborasi.

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022, target pada triwulan (TW) I untuk indikator ini adalah 50% atau 7 jejaring laboratorium yang diikuti secara aktif. Tujuh jejaring tersebut telah diikuti secara aktif dan menjadi capaian realisasi pada tahun 2021, yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan

2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)

a. **Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022**

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN). Pemenuhan target jejaring pada TW I adalah 7 jejaring yang telah menjadi capaian realisasi tahun 2021. Sehingga pada TW I belum ada penambahan jumlah jejaring yang diikuti secara aktif dibandingkan capaian tahun 2021. Namun demikian pada TW I beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka partisipasi aktif pada jejaring yang telah diikuti tahun sebelumnya yaitu antara lain pertemuan ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), persiapan untuk pelaksanaan kegiatan LRPPI, serta pengadaan reagensia, prekursor, baku pembanding dan bahan fungsional. Perhitungan realisasi target indikator persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif pada TWI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Jejaring terealisasi pada TW I tahun 2022}}{\text{Jumlah target Jejaring sampai dengan tahun 2022}} \times 100\% \\ &= 7/14 \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50\%}{50\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap target Tahun 2022**

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{50}{71} \times 100\% \\ &= 70,42 \% \end{aligned}$$

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

#### Analisis Keberhasilan

Pemenuhan 7 (tujuh) Jejaring di TW 1 tahun 2022 sesuai dengan target yaitu sebesar 50%, sehingga persentase capaian IKSS adalah 100%. Pemenuhan ini tercapai karena adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan sehingga apabila terdapat kendala dapat segera diantisipasi dan percepatan untuk pemenuhan realisasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring yang lebih baik terkait pelaksanaan kegiatan dan raelisasi anggarannya.


**Sasaran Strategis 8:**  
**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di**  
**PPPOMN**



#### IKSS 8.1 Indeks RB PPPOMN

Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, BPOM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM. Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan RB, berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Target Indikator kineja Indeks RB PPPOMN ditetapkan pada TW IV tahun 2022. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja Pusat dari KemenPANRB. PPPOMN melakukan monev internal setiap bulan untuk mengevaluasi progres rencana kerja kelompok



kerja pada 6 (enam) area perubahan serta melakukan *update* terhadap lembar kerja evaluasi *self assessment* pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Diharapkan dengan adanya *monev* internal, nilai indeks RB dapat dicapai sesuai target.

#### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Perhitungan capaian indikator kinerja RB tidak dilakukan pada TW 1 karena evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM belum dilaksanakan oleh Inspektorat. Perhitungan capaian akan dilakukan pada TW 4.

### IKSS 8.2 Nilai AKIP PPPOMN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
5. Memberikan informasi kinerja pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome).

#### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Pengukuran indeks AKIP PPPOMN belum dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) untuk melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungnya dalam rangka menuju WBBM pada seluruh unit kerja di BPOM. Nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja pusat oleh KemenPANRB di bagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2021.

## Sasaran Strategis 9: Terwujudnya SDM PPPOMN yang Berkinerja Optimal

### IKSS 9. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

<b>Kualifikasi (25%)</b>	• diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
<b>Kompetensi (40%)</b>	• diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
<b>Kinerja (30%)</b>	• diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
<b>Disiplin (5%)</b>	• diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Dari hasil perhitungan 4 dimensi Indeks Profesionalitas ASN tersebut, indeks Profesionalitas ASN dikategorikan menjadi:

- Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 : Tinggi;
- Nilai 71 - 80 : Sedang;
- Nilai 61 - 70 : Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 : Sangat Rendah

#### a. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun sehingga perhitungan capaian indeks profesional ASN pada TW 1 belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan yang menunjang IKSS 9 sudah dilaksanakan pada TW 1, diantaranya sudah adanya pegawai yang menyelesaikan tugas belajar, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, mengikuti seminar/workshop.

**Sasaran Strategis 10:**  
**Terkelolanya Laboratorium, Data dan Informasi Pengawasan  
Obat dan Makanan di PPPOMN**

IKSS 10.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal dihitung berdasarkan rata-rata dari penilaian berikut:

(1) Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi – e-mail

- Aspek login dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu login per total akun individu.
- Aspek pemanfaatan (b) dengan bobot 40%, dihitung berdasarkan total akun unit aktif per total akun unit.
- Aspek pemanfaatan (c) dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu aktif per total akun individu.

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC

- Persentase aktivitas akses BOC
- Persentase aktivitas login BOC.

(2) Nilai indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC:

- Jumlah frekuensi verifikasi data.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Indeks pemanfaatan system informasi bpom melalui pemanfaatan email di PPPOMN pada tahun 2022 Sampai dengan tw 1 berjalan dengan lancar dimana pada bulan januari dari total akun 167 aktif sebanyak 122 (73%) dan bulan februari dari 167 akun yang aktif sebanyak 132 (79%) dan pada bulan maret dari total 184 akun mengalami peningkatan jumlah yang aktif sebanyak 148 akun (80%).

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\% \\ &= \frac{2,75}{2,25} \times 100\% \\ &= 122,2\% \end{aligned}$$

## b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{2,75}{2,25} \times 100\% \\ &= 122,2\% \end{aligned}$$

## c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta arencan atindak lanjut yang akan dilakukan

Indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal telah mencapai target dan terlampaui. Terdapat perubahan tools penilaian indeks tersebut pada tahun ini sehingga berdampak pada capaian di TW 1 sebesar 122,2% sehingga capaian ini tidak dapat disimpulkan (>120%).

### Tindak Lanjut

Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pusdatin terkait review target indikator.

## IKSS 10.2 Persentase Status Akreditasi

Status akreditasi adalah predikat yang diberikan oleh KAN atau instansi yang berwenang atas hasil audit penerapan sistem mutu di PPPOMN dengan target hingga 2024:

1. ISO 17025:2017
2. ISO 9001:2015
3. PQ WHO
4. WHO NRA Benchmarking
5. ISO 17034:2016 (2022)
6. ISO 17043 (2023)
7. OHSAS 18001 (2024) Sistem Manajemen untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Perhitungan capaian indikator persentase status akreditasi tidak dilakukan pada TW 1. Perhitungan capaian akan dilakukan pada TW 4.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu nilai kinerja anggaran PPPOMN

**Sasaran Strategis 11:**  
**Terkelolanya Keuangan PPOMN yang Akuntabel**

**IKSS 11. Nilai Kinerja Anggaran PPOMN**

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

**a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022**

Cara perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Anggaran PPOMN} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (60\% \times 31.83) + (40\% \times 93.43) = 56.47 \end{aligned}$$

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 TW 1	2022(TW 1)		
			Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	61.41	65	56.47	86.88

**b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022**

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{56,47}{94,01} \times 100\% \\ &= 60,01 \% \end{aligned}$$

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Jika dibandingkan dengan realiasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan 1 tahun 2022 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan nilai capaian Evaluasi Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA lebih tinggi dibanding pada tahun 2021. Nilai tersebut lebih tinggi dikarenakan adanya capaian yang sudah direalisasikan pada triwulan 1 tahun 2022, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2021 belum dihitung pencapaiannya.

Tujuan pelaksanaan monitoring penilaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran PPOMN dengan mewujudkan

meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target TW 1 Tahun 2022

Cara perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (60\% \times 31.83) + (40\% \times 93.43) = 56.47 \end{aligned}$$

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 TW 1	2022(TW 1)		
			Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	61.41	65	56.47	86.88

b. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \%IKSS &= \frac{\%realisasi}{\%target} \times 100\% \\ &= \frac{56,47}{94,01} \times 100\% \\ &= 60,01 \% \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jika dibandingkan dengan realiasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan 1 tahun 2022 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan nilai capaian Evaluasi Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA lebih tinggi dibanding pada tahun 2021. Nilai tersebut lebih tinggi dikarenakan adanya capaian yang sudah direalisasikan pada triwulan 1 tahun 2022, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2021 belum dihitung pencapaiannya.

Tujuan pelaksanaan monitoring penilaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran PPPOMN dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana serta taat pada ketentuan yang berlaku serta menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran PPPOMN yang optimal.

Nilai dari 8 Indikator penilaian IKPA PPPOMN adalah sebagai berikut :

NO	KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	175	632420	PUSAT PENGEMBANGAN PENGEJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Nilai	100.00	100.00	80.35	98.46	100.00	83.50	100.00	88.83	65.40	70%	93.43
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	9.85	10.00	8.35	5.00	22.21			
				Nilai Aspek	100.00			95.46				80.83			

Disclaimer:  
 Sesuai Perdirjen PerbendahraPER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Dari 8 Indikator diatas ada 4 Indikator yang mendapatkan nilai 100, dan 4 Indikator yang mendapatkan Nilai dibawah 100 yaitu :

1. Penyerapan Anggaran
2. Belanja Kontraktual
3. Pengelolaan UP/TUP
4. Capaian Output

Penjelasan dari 4 Indikator yang nilainya dibawah 100 adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran, sesuai dengan Perdirjen Perbendahara Per-5/PB/2022 Indiaktor revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di triwulan1 2022.
2. Belanja Kontraktual , ada 2 komponen pembentuk nilai belanja kotraktual dengan nilai dibawah 100 yaitu 98.46 adalah dikarenakan adanya keterlambatan 1 hari untuk pendaftaran kontrak untuk Pengadaan Jasa Event Organizer dalam rangka Pembahasan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium Badan POM hal ini dikarenakan ada nya penyesuaian pada sistem perintegrasian SAKTI tahun 2022 dan Pengadaan Sewa Rumah Dinas Kepala PPPOMN dalam rangka Belanja Sewa Rumah untuk Pejabat Eselon II.

3. Pengelolaan UP/TUP dengan nilai 83.50, hal ini dikarenakan adanya 1 (satu) kali keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan UP/TUP.
4. Indikator Capaian Output belum mendapatkan nilai optimal dikarenakan adanya 2 output yang progres pelaksanaannya dibawah nilai standar yang ditetapkan pada triwulan 1 sebesar 14,96 yaitu untuk output Sarana Pengujian Obat dan Makanan dan Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengelolaan keuangan dan anggaran
2. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui money DJA;
3. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana; dan
4. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksi.


Upaya tindak lanjut untuk tercapainya indikator ini di triwulan berikutnya adalah:

1. Penyerapan Anggaran yaitu memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang dan modal.
2. Belanja Kontraktual yaitu mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan tepat waktu.
3. Pengelolaan UP dan TUP meliputi menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien. I
4. Capaian Output, langkah strategis yang dilakukan antara lain menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin.

### 3.2 Capaian Kinerja Anggaran TW 1 Tahun 2022

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah ) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan



Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp 42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNBPNP Rp 5.501.327.000. (Lima milyar lima lima ratus satu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp14.000.000.000,(empat belas milyar rupiah). Selama dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret telah dilakukan 3 kali Revisi POK dan 3 kali revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per *output* kegiatan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 11. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output

	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan		23.183.027.000	Januari	Februari		Maret	
4133.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	200.0 NSPK	336.440.000	0	210.385.401	0	127.926.460	149.677.568
4133.B/A	Pengawasan dan Pengendalian Produk		6.918.400.000	15.400.000	231.442.959	0	47.538.022	225.846.569
4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	3.154	15.400.000	0	1.340.000	0	47.538.022	0
4133.BIA.002	Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	1900 Produk	6.903.000.000	15.400.000	230.102.959	0	0	225.846.569
4133.CAB	Layanan Sarana Internal	1.0 unit	2.075.187.000	0	0	0	0	0
4133.CAN	Layanan Sarana Internal	1.0 unit	753.000.000	0	0	0	0	0
4133.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	90 produk	2.400.000.000	0	54.597.500	189.710.400	0	400.000
4133.PEE	Kemitraan	10	1.900.000.000	0	0	0	0	0
4133.TAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		8.800.000.000	0	217.021.520	186.388.049	0	72.732.000
4133.TAH.001	Sistem Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	20 persen	6.000.000.000	0	6.751.000	0	0	0
4133.TAH.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	26.0 Layan an	2.800.000.000	0	210.270.520	186.388.049	0	72.732.000
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen		38.126.484.000	1.089.328.012	2.652.326.072	0	0	3.376.025.193
6384.EAA	Layanan Perkantoran	1.0 Layan an	38.126.484.000	1.089.328.012	2.652.326.072	0	0	3.376.025.193
6384.EBA	Layanan Perkantoran [Base Line]	1	38.126.484.000	1.089.328.012	2.652.326.072	0	0	3.376.025.193



# BAB IV

---

PENUTUP

## BAB IV - PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Renstra PPPOMN dimana pada tahun sebelumnya (2021) telah dilakukan Reviu Rentra sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja. Dengan adanya Reviu Renstra ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih matang dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang relevan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022, yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024 yang mempunyai 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja.

1. Dari 16 indikator utama tersebut baru 9 (sembilan) indikator yang sudah dilakukan perhitungan capaiannya, sedangkan 7 (tujuh) indikator diukur pada akhir tahun.
2. Hasil pengukuran capaian indikator didapatkan nilai sebagai berikut.

#### **Kriteria baik $90\% \leq x < 110\%$ yaitu**

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian (96,38%)
- ✓ Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM (100%)
- ✓ Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan (99,06%)
- ✓ Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan (100,56%)
- ✓ Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar (97,40%)
- ✓ Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu (107,53%)
- ✓ Jejaring pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif (100%)


#### **Kriteria cukup $70\% \leq x < 90\%$**

- ✓ Nilai kinerja anggaran PPPOMN (86,88 %)

#### **Kriteria tidak dapat disimpulkan $>120\%$**

- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal (122,2%)

3. Kegiatan yang pengukurannya di akhir tahun
4. Sedangkan 7 indikator yang pengukurannya dilakukan diakhir tahun yaitu:
  - Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium,
  - Indeks pelayanan publik PPPOMN,
  - Indeks RB PPPOMN,
  - Nilai AKIP PPPOMN,

- 
- Indeks profesionalitas ASN PPPOMN, dan
  - Persentase status akreditasi

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan meningkatkan kinerja PPPOMN sebagai berikut :

1. Melakukan reuiu target / koordinasi dengan pusdatin terkait nilai indeks pengelolann data yang hasilnya jauh melampoi target

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. ( 021 ) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427  
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.  
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	20
Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
Meningkatnya laboratorium BB/Balal POM yang memenuhi standar GLP	persentase laboratorium POM yang sesuai GLP (Standar Kemampuan Laboratorium)	80
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82.6
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase Baku Pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81.5
Meningkatnya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
Meningkatnya pelayanan pengujian dan kalibrasi	Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
Meningkatnya pelayanan pengujian dan kalibrasi	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.30
Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	87.6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai AKIP PPPOMN	78.7
Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25
Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Status akreditasi	71
Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94.1

Kegiatan : Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  
Anggaran : Rp. 85,957,671,000.00

Pihak Kedua

Jakarta, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

## Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Standar Kemampuan Laboratorium	76	77	79	81	907.230.000
		2. Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	7	9	12	20	6.039.120.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPPOMN	-	-	-	91	3.071.931.000
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	80	3.599.016.000
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,45	77,80	79,35	82,60	4.463.566.000
		6. Persentase Baku Pembandingan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	72,94	75,22	78,24	81,50	1.844.838.000
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	25	50	75	100	2.898.800.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	93	93	17.494.800.000
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	4,30	2.776.927.000

7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	50	57	64	71	1.748.069.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	-	-	-	87,6	24.612.148.000
		12. Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	78,7	753.000.000
9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	-	-	-	86,25	1.251.174.000
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	-	-	-	71	497.052.000
		15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	-	-	-	2,25	4.480.960.000
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	65	75	85	94,1	9.519.040.000

Jakarta, 16 Desember 2021  
 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
 OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm

### Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah		Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai i = b + e / 2
			b = a	c	Email (c)	Dashboard BOC (d)		
1	Inspektorat I	3	3	3	3	3	3	3
2	Inspektorat II	3	3	3	3	3	3	3
3	Biro Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3
4	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3	3
5	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3	3	3	3	3	3	3
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3	3	3	3	3	3	3
7	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3
8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3
9	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3	3	3	3	3	3	3
10	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3	3	3	3	3	3	3
11	Direktorat Cegah Tangkal	3	3	3	3	3	3	3
12	Biro Hukum dan Organisasi	3	3	3	2	2,5	2,75	2,75
13	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
14	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	3	2	2,5	2,75	2,75
15	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3	3	3	2	2,5	2,75	2,75
16	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
17	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
18	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
19	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3	3	3	2	2,5	2,75	2,75
20	Direktorat Pengawasan Kosmetik	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
21	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	3	3	2	3	2,5	2,75	2,75
22	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3	3	3	2	2,5	2,75	2,75
23	Biro Perencanaan dan Keuangan	3	3	1	3	2	2,5	2,5